



BAWASLU KOTA YOGYA SIAP JARING PANWASLU KECAMATAN

Honorarium Meningkatkan, Dorong Kinerja Badan Ad Hoc

YOGYA (KR) - Honorarium badan ad hoc pengawas Pemilu 2024 dipastikan bakal mengalami kenaikan yang signifikan dibanding pemilu sebelumnya. Peningkatan honor tersebut diharapkan mampu mendorong kinerja para petugas pengawasan pemilu baik di tingkat kecamatan, kelurahan maupun pengawas TPS.

Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Yogya Noor Harsya Aryo Samudro, mengungkapkan kepastian kenaikan honorarium badan ad hoc tersebut sudah disampaikan Bawaslu RI sejak jauh hari. "Besarnya nanti bisa mendekati atau bahkan sama dengan badan ad hoc KPU. Tetapi yang jelas kenaikannya cukup signifikan jika dibanding pemilu sebelumnya," urainya, Senin (22/8).

Dari informasi awal, honor Ketua Panwaslu Kecamatan pada Pemilu 2024 mendatang mencapai Rp 2,5 juta perbulan sedangkan anggota Rp 2,3 juta perbulan. Pada pemilu sebelumnya, Ketua Panwaslu Kecamatan mendapat honor Rp 1,8 juta perbulan dan anggota Rp 1,6 juta perbulan. Honor Panwaslu Kelurahan yang sebelumnya Rp 900.000 dan Pengawas TPS Rp 550.000, dipastikan juga akan mengalami ke-

naikan yang signifikan.

Harsya menambahkan, honor tersebut masih belum termasuk pendapatan tambahan lainnya. Seperti Panwaslu Kecamatan tiap bulan masih mendapatkan uang transpor perjalanan dinas. Selain itu jika ada bimbingan teknis, rapat maupun sosialisasi juga disediakan honorarium tambahan. Besaran uang transpor itu bahkan lebih tinggi dibanding badan ad hoc KPU. "Besaran teknis honorarium itu akan diatur lebih lanjut. Tetapi harapannya mampu memacu kinerja dalam mengawasi jalannya pemilu," imbuhnya.

Badan ad hoc pengawasan pemilu di Kota Yogya terdiri dari Panwaslu Kecamatan sebanyak 42 orang, Panwaslu Kelurahan 45 orang, dan Pengawas TPS 1.373 orang. Dalam waktu dekat, pembentukannya akan segera dilakukan. Terutama Panwaslu Keca-

matan yang tahapan pendaftarannya direncanakan mulai pekan ini. Bawaslu Kota Yogya tinggal menunggu petunjuk teknis dari Bawaslu RI sebelum membuka desk pendaftaran.

Sesuai tahapan, Panwaslu Kecamatan harus sudah dilantik pada Oktober mendatang. Sebulan setelahnya, dilanjutkan dengan pembentukan Panwaslu Kelurahan. "Panwaslu Kecamatan akan dibentuk lebih dulu dibanding badan ad hoc KPU seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) Karena salah satu tugas Panwaslu Kecamatan nantinya ialah mengawasi pembentukan PPK dan PPS," tandasnya.

Badan ad hoc KPU rencananya harus terbentuk pada Januari 2023, sedangkan tahapannya dimulai November atau Desember. Sehingga pengawasannya sudah mulai dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan. Di samping itu, pada Oktober juga sudah dilakukan pemutakhiran data pemilih yang berisikan verifikasi faktual berkas parpol. Ketugasan Panwaslu Kecamatan pun sangat dibutuhkan dalam membantu kinerja Bawaslu. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005